

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Lahirnya koperasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung didorong oleh suatu keinginan bersama di lingkungan para pegawai dan mulai berkembang sekitar tahun 1961, dimana pada waktu itu Walikota Bandung dijabat oleh Bapak R. Priatna Kusuma. Di dalam lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kotamadya Bandung sendiri pada beberapa unit kerja. Hal ini membuktikan bahwa hasrat berkoperasi telah berkembang di lingkungan Pemda Kota Bandung.

Berdasarkan pada anjuran pemerintah pusat, bahwa pada setiap jabatan atau instansi hanya ada satu buah koperasi, maka ketujuh buah koperasi simpan pinjam yang ada di tiap-tiap unit kerja tersebut bersepakat untuk mendirikan satu buah koperasi pegawai. Pada tanggal 11 Mei 1962 dibentuklah sebuah koperasi bernama Koperasi Pegawai Otonom Kotapraja Bandung (KPOKB) sebagai perwujudan dari ketujuh koperasi sebelumnya.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Koperasi pada tanggal 12 Juli 1963, KPOKB disahkan sebagai Badan Hukum dengan Nomor: 2890/BH/IV. Perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 maka diadakan akte

penyesuaian pada tanggal 6 September 1967 dengan nomor 42/BH/IX-19 Desember 1967. Pada saat memperoleh penyesuaian Badan Hukum tersebut, terjadi pergantian dari KPOKB menjadi KPKB atau Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih mengkoordinasikan penyampaian tujuan secara bersama melalui anjuran pemerintah yaitu untuk tidak mendirikan beberapa koperasi dibawah satu Kantor Pemerintah, seiring dengan perubahan Kotapraja menjadi Kotamadya

KPKB memiliki jumlah modal yang relatif kecil pada saat didirikan, yaitu sebesar Rp 158.693,- dengan anggota sebanyak 50 orang. Modal tersebut diperoleh dari simpanan anggota berupa simpanan pokok sebesar Rp.100,- simpanan wajib Rp.75,-/bulan dan simpanan sukarela sebesar Rp.50,-/bulan. Dalam pertumbuhannya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) baik yang berkenaan dengan tingkat sosial, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia, antara lain:

- a. Sekitar tahun 1965 kepengurusan KPKB dipolitisir, dimana dimasuki unsur-unsur nasakom bahkan akhirnya dibubarkan.
- b. Pada tahun 1965 terjadilah hal yang sangat tidak wajar pada organisasi koperasi, yaitu kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dibidang moneter berupa *sanering*, nilai uang Rp. 1000,- menjadi Rp. 1.00,-

Setelah Orde Baru berakhir terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1967, perkembangan KPKB mulai

memperlihatkan kemajuan. Hal ini ditandai pada tanggal 6 September 1968 KPKB mendapat status Badan Hukum berdasarkan adanya ketetapan No. 42/bh/ix-12-67. Keanggotaan KPKB bersifat sukarela sampai pada akhir 1971. Kemudian sesuai dengan instruksi Walikotaamadya No. 23 tanggal 20 Oktober 1971 yang isinya mengharuskan setiap Pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi anggota KPKB dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah pegawai kotamadya, terutama setelah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kotamadya Bandung dan adanya dukungan tersendiri dari setiap pegawai yang berada di unit-unit kerja yang ada di kantor Pemerintah Kotamadya Bandung. Kebijakan Walikotaamadya selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 5461/72 tanggal 28 Maret 1972, agar Yayasan “Gemah Ripah” yang bernaung dibawah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang pada waktu sebelumnya diserahkan tugas untuk mengurus kesejahteraan pegawai, menyerahkan kekayaan material, finansial dan personil serta kegiatan usahanya kepada KPKB. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya *dualism* didalam mengurus kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan perkembangan KPKB pada tanggal 17 Nopember 1976, terjadi akte peubahan pergantian Nomor Badan Hukum menjadi No.42A/BH/DK-01/1-1976, selanjutnya mengalami perubahan Nomor Badan Hukum kembali pada tanggal 9 Maret 1987 dengan

No.42B/BH/KMK-10/21, perubahan pertama No.42C/BH/KWK-10/21-24 September 1991 dan perubahan terakhir No.1522/KEP/KWK-10/XI/24 November 1997.

Upaya yang dilakukan pengurus beserta sifatnya dalam mengelola koperasi sampai saat ini dapat dikatakan berhasil yakni dapat dilihat dari kemajuan dan prestasi terbaik yang pernah diraih KPKB dari tahun ke tahun begitu pesatnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi, KPKB mendapat klasifikasi sangat mantap kelas A dengan No. 01-KPTS/KDK 10.021/4/11/1986.
- b. Pada pemeriksaan tanggal 11 sampai dengan 12 Januari 1982 kembali KPKB mendapatkan penghargaan dengan klasifikasi A (sangat baik) dengan surat perintah tugas dari Departemen Koperasi Kota Bandung No. 11/KDK/10.21/4/51/1/88 tanggal 11 Januari 1988.
- c. Tahun 1987 pada hari Koperasi ke-40 dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi RI No. 325/PTS/M/VII/1987 KPKB memperoleh predikat Koperasi Teladan Tingkat Nasional.
- d. Tahun 1988 KPKB kembali memperoleh predikat Koperasi Teladan Utama Nasional.
- e. Tahun 1996 sampai sekarang termasuk ke dalam koperasi 5 besar (*The Big Five Cooperative*).

- f. Tahun 2002 KPKB memperoleh sertifikat Koperasi Konsumsi yang berprestasi dari Propinsi.

Prestasi yang dicapai KPKB ini tentu saja tidak terlepas dari segala upaya dan kerja keras pengurus dalam peningkatan dan penyempurnaan baik itu dalam hal administrasi maupun organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang di bentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi ini merupakan salah satu kelengkapan penting bagi suatu perusahaan dimana di dalamnya digambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan pemisah fungsi. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi ini mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi.

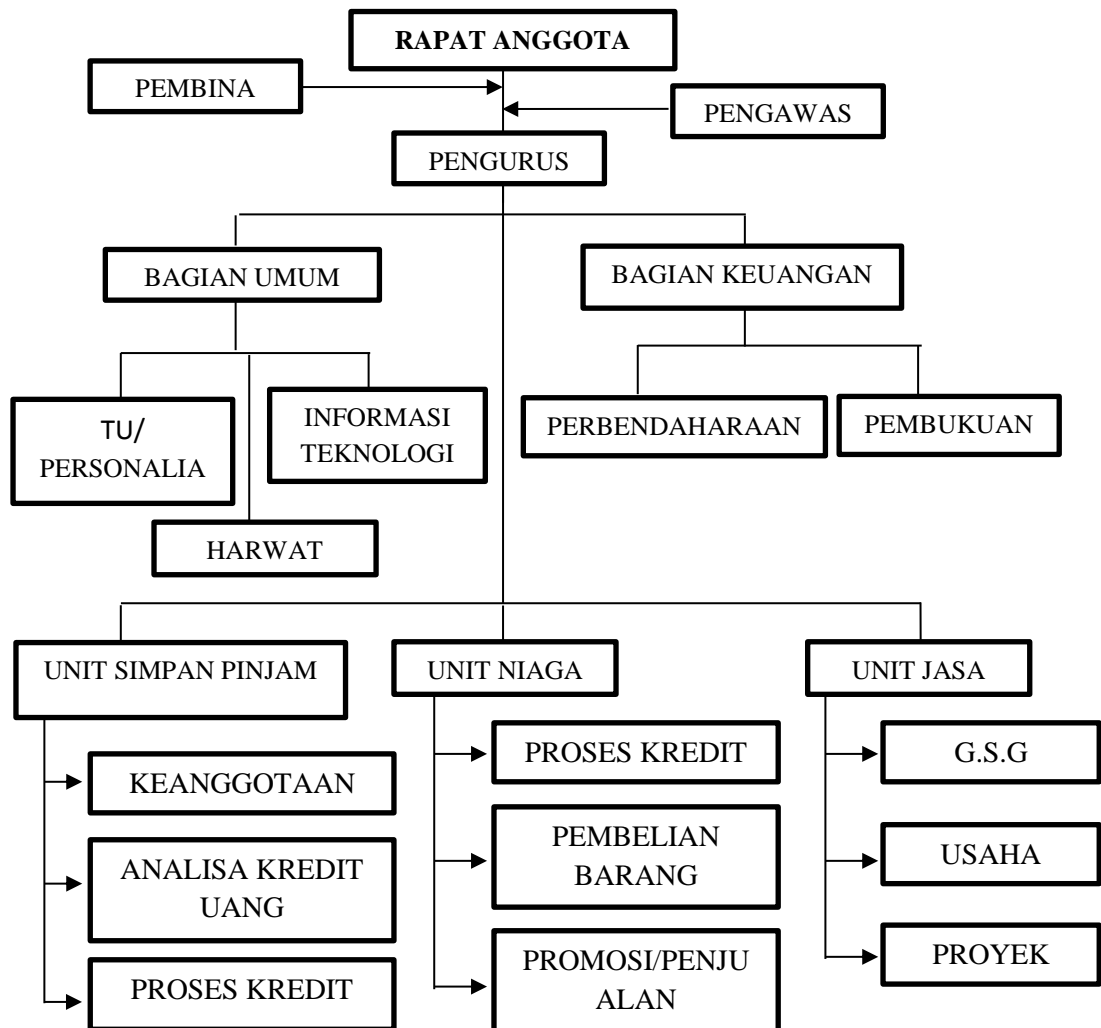
Manfaat dari adanya struktur organisasi yaitu:

- a. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dalam organisasi
- b. Menggambarkan jenjang karir yang jelas
- c. Memberikan informasi yang jelas siapa yang bertanggung jawab kepada bidang tertentu, serta memperlihatkan fungsi yang ada.

Susunan organisasi:

- a. Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung terdiri dari:
 - 1) Ketua Pengurus
 - 2) Wakil Ketua Pengurus
 - 3) Sekretaris Pengurus
 - 4) Wakil Sekretaris Pengurus
 - 5) Bendahara Pengurus
- b. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub. Bagian Tata Usaha dan Personalia
 - 2) Sub. Bagian Pemeliharaan dan Perawatan
 - 3) Sub. Bagian Informasi dan Teknologi Komputer
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari substansi bagian perbendaharaan dan substansi bagian pembukuan
- d. Bagian Simpan Pinjam, terdiri dari seksi keanggotaan, seksi analisa kredit keuangan, dan seksi proses kredit
- e. Bagian Niaga, terdiri dari seksi promosi dan seksi penjualan, seksi pembelian, seksi analisa dan proses kredit
- f. Bagian Jasa, terdiri dari seksi gedung serba guna, seksi usaha, dan seksi proyek

Berikut adalah uraian struktur organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

3. Deskripsi Tugas

Tugas pokok pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, adalah menyusun kebijakan segala usaha dan kegiatan koperasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berikut tugas pokok pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung beserta jajarannya:

a. Tugas ketua pengurus koperasi

Memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi, melaksanakan tugas yang telah di sahkan pada rapat anggota tahunan, mengkoordinir penyusunan rencana kerja, mengawasi pengelolaan keuangan, material dan objek-objek lainnya yang menjadi usaha koperasi, menandatangani segala bentuk surat keluar bersama-sama sekretaris, memberikan persetujuan penerimaan dan pengeluaran keuangan, pemberian kredit yang bersifat khusus serta menandatangani cek untuk kepentingan organisasi, bersama-sama dengan bendahara, melakukan hubungan kerja dengan badan, lembaga tertentu dalam usaha mencari atau penambahan modal kerja, dan mewakili organisasi apabila terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

b. Tugas pokok bendahara pengurus koperasi

Membantu dan mendampingi ketua dalam upaya menata penyelenggaraan administrasi keuangan, menerima dan menyimpan semua pendapatan pada bank yang sudah ditunjuk atas kewenangan pengurus.

c. Tugas pokok bagian umum

Melaksanakan segala kegiatan dibidang ketatausahaan, organisasi personalia, komputerisasi, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan, dan pemeliharaan aset-aset organisasi.

d. Tugas pokok bagian keuangan

Menyusun, merumuskan perencanaan penggunaan keuangan KPKB, menyiapkan laporan keuangan setiap akhir bulan.

e. Tugas pokok unit simpan pinjam

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam yang meliputi keanggotaan, analisa kredit, dan proses kredit uang.

f. Tugas pokok unit usaha niaga

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha niaga meliputi urusan pembelian, urusan gudang/toko, urusan kredit dan marketing.

g. Tugas pokok unit jasa

Mengkoordinir pelaksana kegiatan pencarian pekerjaan, pengelolaan gedung serbaguna dan pelaksanaan proyek.

4. Visi dan Misi

Visi, terwujudnya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang Mandiri, Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Pelayanan prima bagi anggota.

- a. Mandiri, artinya dalam menjalankan usaha koperasi bertumpu kepada kemampuan modal sendiri yaitu dengan modal dari anggota untuk anggota.
- b. Professional, artinya pengelolaan koperasi dilaksanakan secara baik dan benar.
- c. Kreatif dan Inovatif, artinya senantiasa mengembangkan pembaharuan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan fungsi usaha dan fungsi sosial koperasi untuk kepentingan anggota.

Misi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

- a. Mengembangkan unit-unit usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya.
- b. Meningkatkan kualitas dan kemampuan manajemen serta profesionalisme kewirakoperasian pengurus, pengawas, manager dan karyawan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
- c. Mengoptimalkan dan memberdayakan Aset dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebagai lembaga ekonomi yang modern dan berwatak kerakyatan.

5. Azas dan Tujuan

Berazaskan kekeluargaan dan gotong royong menurut ajaran dan falsafah Pancasila.

Bertujuan, sesuai rencana Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

- a. Meningkatkan hasil usaha KPKB
- b. Mengembangkan pekerjaan dan jaringan usaha kemitraan yang lebih luas
- c. Meningkatkan kinerja, pengurus, pengawas, manager dan karyawan KPKB yang professional dan akuntabel
- d. Meningkatkan partisipasi, disiplin dan tanggung jawab anggota akan berbagi program dan kegiatan KPKB
- e. Meningkatkan kerjasama koordinasi dengan berbagai instansi terkait
- f. Mengembangkan sarana dan proses kerja KPKB bagi kelancaran kegiatan KPKB

6. Landasan dan Prinsip

- a. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai keanggotaan, pengelolaan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

7. Aktivitas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Kegiatan usaha diselenggarakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan pokok-pokok program kerja Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang telah direalisasi secara berjenjang dan bertahap guna mencapai sasaran yang diharapkan selanjutnya dapat dilihat pada masing-masing unit usaha pada KPKB dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Pelayanan pemberian simpan pinjam kepada anggota merupakan primadona usaha dalam memenuhi kebutuhan anggota setiap bulannya yang terus mengalami peningkatan, untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung anggota harus mengajukan surat permohonan tertulis berupa daftar isian yang telah disediakan oleh pengurus dalam bentuk formulir yang tertulis yang disertai dengan identitas diri serta bukti pembayaran terakhir dalam bentuk struk potongan gaji.

b. Unit Usaha Niaga

Unit usaha niaga bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota dengan menyediakan berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Usaha niaga yang telah ada selama ini yaitu unit pertokoan diadakan dalam pengembangan modal usaha dan peningkatan dengan penyediaan barang segala kebutuhan pokok dengan harga murah seperti harga barang di supermarket lainnya

seperti barang konsumsi, barang kelontongan dan barang elektronik serta barang kebutuhan lainnya yang diperlukan anggota. Keberadaan toko terus diusahakan perkembangannya dengan pihak yang mempunyai keterkaitan dengan unit usaha niaga.

c. Unit Usaha Jasa

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam usaha jasa ini mempunyai berbagai kegiatan usaha dalam melayani anggotanya, antara lain:

1) Pengelolaan ruang serba guna dan penyewaan bangunan

Memberikan pelayanan kepada anggota dalam hal penyewaan gedung untuk keperluan berbagai macam acara untuk keperluan rapat, penataran, pendidikan dan latihan baik diselenggarakan oleh koperasi maupun instansi atau lembaga koperasi lainnya.

2) Unit pengelolaan peralatan pesta

Unit usaha ini melayani para anggota dalam hal penyewaan kursi pesta dalam berbagai macam acara, serta penyewaan *sound system*.

3) Unit jasa dan pengelolaan kantin

Pengelolaan kantin merupakan kerjasama antara Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan sebuah rumah makan.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang evaluasi penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan SAK ETAP. Pertama penulis memaparkan laporan keuangan diantaranya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kedua Penulis menggunakan tabel perbandingan untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan koperasi dengan SAK ETAP. Terakhir menjelaskan serta mendeskripsikan dari evaluasi penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan SAK ETAP dalam tabel tersebut.

Data utama yang digunakan oleh untuk mengevaluasi adalah laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk periode yang berakhir pada akhir tahun 2017. Laporan keuangan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Data pendukung berupa dokumen-dokumen dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung mengenai pos-pos dalam laporan keuangan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

2. Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Neraca Gabungan

Per: 31 Desember 2017

No	Perkiraan	2017	2016	No	Perkiraan	2017	2016
A	Aktiva Lancar			E	Kewajiban Lancar		
1	Kas	xxx	xxx	1	Tabungan SIJAKO	xxx	xxx
2	Bank	xxx	xxx	2	Modal tidak tetap	-	-
3	Deposito di bjb	xxx	xxx	3	Hutang usaha	xxx	xxx
4	Deposito di ocbe NISP syariah	xxx	xxx	4	Hutang lain-lain	xxx	xxx
5	Bank BCA	xxx	xxx	5	Dana-dana non usaha	xxx	xxx
6	Pinjaman diberikan	xxx	xxx	6	Dana-dana SHU	xxx	xxx
7	Penyisihan penghapusan pinjaman	(xxx)	(xxx)	7	Pend. Sewa dibayar dimuka	xxx	xxx
8	Penyertaan modal tidak tetap	-	-	8	Simpanan sukarela	xxx	xxx
9	Beban dibayar dimuka	xxx	xxx	9	Asuransi	-	-
10	Persediaan buku paket	xxx	xxx	10	Kewajiban lain-lain	xxx	xxx
11	Persediaan Barang	xxx	xxx	11	Beban YMH dibayar	xxx	xxx
12	Piutang lain-lain	xxx	xxx	12	Hutang pajak	xxx	xxx
13	Penyisihan piutang	(xxx)	(xxx)				
14	Investasi Proerty	xxx	xxx				
15	Amortiasasi	(xxx)	(xxx)				
		xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
B	Investasi J.Panjang			F	Kewajiban J.Panjang		
1	Simpanan di PKPRI	xxx	xxx	1	Penyertaan modal dari pemkot	xxx	xxx
2	Simpanan di KJA- Andika	-	-	2	Pinjaman lembaga lainnya	xxx	xxx
3	Penyertaan modal kecipaganti	xxx	xxx				
		xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
C	Aktiva Tetap			G	Kekayaan Bersih		
1	Tanah	xxx	xxx	1	Simpanan pokok	xxx	xxx
2	Bangunan kantor	xxx	xxx	2	Simpanan wajib	xxx	xxx
3	Akm.peny bangunan kantor	(xxx)	(xxx)	3	Simpanan wajib khusus	xxx	xxx
4	Inventaris kantor	xxx	xxx	4	Simpanan 12 juli	xxx	xxx
5	Akm.peny inventaris kantor	(xxx)	(xxx)	5	Modal disetor	-	-
6	Kendaraan bermotor	xxx	xxx	6	Modal tetap tambahan	-	-
7	Akm.peny kendaraan bermotor	(xxx)	(xxx)	7	Cadangan umum	xxx	xxx
		xxxx	xxxx	8	Modal donasi	xxx	xxx
D	Aktiva Lain-lain			9	Cadangan tujuan resiko	-	-
1	Aktiva dalam proses	xxx	xxx	10	SHU tahun lalu	-	xxx
2	Akm.peny aktiva lain-lain	xxx	xxx	11	SHU bulan berjalan	xxx	-
	Jumlah Aktiva	xxxx	xxxx		Jumlah Passiva	xxxx	xxxx

Laporan Laba Rugi
Per: 31 Desember 2017

No	Uraian	2017	No	Uraian	2017
A	Pendapatan		B	Biaya	
1	Pendapatan jasa pinjaman	xxx	1	Biaya karyawan	xxx
2	Pengeluaran biaya cetak & provisi	xxx	2	Biaya pemeliharaan bangunan	xxx
3	Pendapatan usaha dan lainnya		3	Biaya pemeliharaan kendaraan	xxx
	-Pendapatan unit pusat	xxx	4	Biaya keuangan	xxx
	-Pendapatan unit jasa	xxx	5	Biaya organisasi dan pembinaan	xxx
	-Pendapatan unit niaga	xxx	6	Biaya kegiatan koperasi	xxx
			7	Biaya administrasi	xxx
			8	Biaya computer	xxx
			9	Biaya operasional	xxx
			10	Biaya social	xxx
			11	Biaya penyusutan	xxx
			12	Biaya cadangan	xxx
	Pendapatan lainnya	xxx		SHU bulan berjalan	xxx
	Jumlah pendapatan	xxxx		Jumlah biaya	xxxx

Laporan Perubahan Ekuitas
Per: 31 Desember 2017

No	Uraian	2017	2016
A	Kekayaan Bersih Awal Tahun	xxx	Xxx
B	Bertambah dari		
	1. Simpanan pokok	xxx	xxx
	2. Simpanan wajib	xxx	xxx
	3. Simpanan wajib khusus	xxx	xxx
	4. Simpanan 12 juli	xxx	xxx
	5. Cadangan umum	xxx	xxx
	6. Modal donasi	xxx	xxx
	7. SHU bulan berjalan	xxx	xxx
C	Berkurang dari		
	SHU Tahun lalu	(xxx)	(xxx)
D	Saldo kekayaan bersih akhir tahun	xxx	xxx
E	Kenaikan Modal Sendiri tahun sebelumnya	xxx	xxx

Laporan Arus Kas
Per: 31 Desember 2017

No	Keterangan	31 Desember 2017
A	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
	Hasil usaha sebelum pendapatan dan beban lain-lain	(xxx)
	:	
	1. Kenaikan Pendapatan lain-lain	xxx
	2. Kenaikan Beban lain-lain	(xxx)
	3. Penurunan Estimasi pajak penghasilan	(xxx)
	Hasil usaha operasi sebelum perubahan modal	xxxx
	Perubahan modal	
	4. Kenaikan Piutang usaha	(xxx)
	5. Kenaikan Piutang Pinjaman	(xxx)
	6. Kenaikan Piutang lain-lain	(xxx)
	7. Penurunan Persediaan	xxx
	8. Kenaikan Persediaan setelah dipakai	(xxx)
	9. Kenaikan Dibayar dimuka	(xxx)
	10. Kenaikan Proferti investasi	(xxx)
	11. Penurunan Hutang usaha	(xxx)
	12. Kenaikan Hutang simpanan anggota	xxx
	13. Kenaikan Hutang lain-lain	xxx
	14. Kenaikan Hutang bank jangka pendek	xxx
	15. Penurunan Titipan-titipan	(xxx)
	16. Kenaikan Hutang pajak	xxx
	17. Penurunan Hutang dana bagian SHU	(xxx)
	18. Kenaikan Hutang dana non SHU	(xxx)
	19. Penurunan Pendapatan tangguhan	(xxx)
	20. Kenaikan Biaya yang masih harus dibayar	xxx
	Jumlah perubahan modal	(xxx)
	Arus Kas aktivitas operasi	(xxxx)
B	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
	Aktivitas Investasi	
	21. Penurunan Aset tetap	Xxx
	22. Kenaikan Aset lain-lain	(xxx)
	23. Penurunan Hutang jangka panjang lainnya	-
	24. Arus Kas aktivitas investasi	xxxx
C	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
	25. Penurunan Simpanan pokok	(xxx)
	26. Kenaikan Simpanan wajib	xxx
	27. Kenaikan Simpanan wajib khusus	xxx
	28. Kenaikan Simpanan 12 juli	xxx
	29. Kenaikan Cadangan	xxx
	30. Sisa Hasil Usaha tahun lalu	(xxx)
	Arus Kas aktivitas pendanaan	(xxx)
	Kas dan setara kas awal tahun	Xxxxxx
	Kas dan setara kas akhir tahun	xxxxxx

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per: 31 Desember 2017

A. Gambaran Umum

1. Pendirian Koperasi
Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), SIUP No.501/1-250/352/1994/0745-DISINDAG/2004.
NPWP No.01.118.631.9-423, didirikan sesuai dengan Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Barat
2. Usaha Koperasi
Koperasi bergerak dibidang usaha :
 - a. Unit usaha simpan pinjam
 - b. Unit usaha niaga
 - c. Unit usaha jasa lainnya
3. Pengurus, Pengawas, Anggota dan Karyawan
Susunan pengurus koperasi pegawai pemerintah kota bandung. Untuk periode tahun 2016 s.d 2021 sbb :
 - a. Ketua : Drs. ATET DEDI HANDIMAN
 - b. Sekretaris : Drs. YAYA SUNARYA, M.Si
 - c. Wakil Sekretaris : AJIJI
 - d. Bendahar : LILIS SURYANINA
 Susunan pengawas :
 - a. Ketua : DASEP RUSWANA S., S.Ip.,M.Si.
 - b. Anggota : H. YAN ACHMAD SOFYAN, S.E., M.Si
 - c. Anggota : DADAN, Ak.,M.Si.CA
 Pada tahun 2017 jumlah karyawan 33 orang, karyawan kontrak 1 orang.
Jumlah anggota 5.374 orang.

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas kecil, giro di bank dan setoran dalam perjalanan dari pihak ke III serta deposito jangka pendek yang jangka waktunya kurang dari tiga bulan
3. Piutang
Piutang usaha disajikan dalam jumlah neto setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan review atas kolektabilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih
4. Aset tetap
Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, pengeluaran untuk penggantian dan biaya perbaikan yang secara signifikan penambahan masa manfaat aset tetap dikapitalisasi. Penyusunan aset tetap kecuali hak atas tanah dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat dari aset yang bersangkutan. Diantaranya :
Bangunan 20 tahun, Kendaraan 5 tahun, dan Peralatan kantor 10 tahun

5. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan koperasi yang timbul dari partisipasi anggota berupa transaksi dengan anggota diakui sebesar nilai bruto, sedangkan pendapatan koperasi berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan sebesar nilai transaksi. Beban diakui pada saat terjadinya, beban tahun diamortisasi menjadi beban bulanan secara proposional berdasarkan metode garis lurus
6. Beban Perkoperasian
Merupakan beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.
7. Reklasifikasi Akun
Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
8. Imbalan Pasca Kerja
Untuk memenuhi UU no 13 dan PSAK 24 tentang imbalan pasca kerja, koperasi melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 yaitu dengan DPLK dan BPJS ketenagakerjaan, dengan cara menyetorkan setiap bulan untuk dana pension karyawan.

3. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

SAK ETAP diperuntukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan mengatur penyusunan laporan keuangan entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk memberi kemudahan pada entitas dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu entitas yang diatur oleh pemerintah untuk menggunakan SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau analisa perbandingan, dalam membandingkan penyajian laporan keuangan koperasi dengan peraturan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dalam melihat hasil kesesuaiannya.

Berikut adalah tabel perbandingan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dan laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.1
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

No	Item	SAK ETAP	KPKB	Penyajian		Keterangan
				Sesuai	Tidak	
A. Neraca						
1	Dasar Penacatatan	Dasar pencatatan neraca menggunakan metode akrual	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan dasar akrual karena ada akun utang dan piutang	√		Sebagai dasar pencatatan koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP karena memakai dasar akrual
2	Aset	Aset minimal menyajikan akun sebagai berikut : a. kas dan setara kas b. piutang usaha dan piutang lainnya c. persediaan d. proverti investasi e. aset tetap f. aset tidak berwujud	Laporan keuangan KPKB menyajikan akun-akun : a. kas, bank, dan deposito b. persediaan buku paket, persediaan barang c. piutang lain-lain d. investasi proverti e. tanah, bangunan kantor, inventaris kantor dan kendaraan bermotor f. aset dalam proses	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi kriteria persyaratan

3	Kewajiban	Kewajiban minimal menyajikan akun-akun sebagai berikut : a. utang usaha dan utang lainnya b. aset dan kewajiban pajak	Laporan keuangan koperasi menyajikan akun-akun : a. tabungan sijaiko b. hutang usaha dan lainnya c. hutang pajak	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi persyaratan
4	Ekuitas	Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian yang relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.	Neraca koperasi telah menyajikan pos judul dan sub jumlah yang relevan dengan klasifikasi yang tepat dan jelas.	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena akun yang disajikan telah memenuhi persyaratan
5	Kalsifikasi aset dan kewajiban	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyajikan informasi yang andal dan lebih relevan	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang, terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih relevan		√	Karena klasifikasi aset dengan nama “investasi” dibawah aset lancar dan diatas aset tetap maka sifat aset dalam klasifikasi tersebut tidak disajikan berdasarkan likuiditas.

B. Laporan Laba Rugi						
1	Informasi yang disajikan	Laporan laba rugi minimal mencakup akun-akun sebagai berikut : a. pendapatan b. beban keuangan c. beban pajak d. laba atau rugi neto	Laporan laba rugi koperasi sebagai berikut: a. pendapatan jasa pinjaman, pendapatan unit pusat, unit jasa dan niaga. b. biaya karyawan, biaya pemeliharaan bangunan dan kendaraan, biaya keuangan, biaya administrasi, biaya komputer, dll c. SHU		√	Tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tidak terdapat akun beban pajak dalam laporan laba rugi
2	Informasi yang disajikan	Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi, jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.	Pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi telah disajikan dengan relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena informasi yang disajikan memenuhi syarat.
C. Laporan Perubahan Ekuitas						
1	Informasi yang disajikan	Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang mencakup : a. laba atau rugi untuk periode b. pendapatan dan beban yang diakui ekuitas	Laporan perubahan ekuitas yang disajikan mencakup : a. SHU bulan berjalan b. SHU tahun lalu	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena yang disajikan telah memenuhi persyaratan.

D. Laporan Arus Kas						
1	Informasi yang disajikan	Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan klasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah menyajikan laporan arus kas dengan klasifikasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yaitu klasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena klasifikasi laporan arus kas koperasi disajikan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
2	Aktivitas Operasi	Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas	Arus kas dari aktivitas operasi didapat dari aktivitas utama koperasi diantaranya SHU dan arus simpan pinjam kas dengan anggota	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena aktivitas operasi terutama di peroleh dari aktivitas penghasil utama koperasi.
3	Aktivitas Investasi	Arus kas dari aktivitas investasi menganut tentang pengeluaran kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan	Arus kas investasi koperasi berisi penurunan aset dan hutang yang menjelaskan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan.	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena tujuan arus kas investasi telah memenuhi persyaratan SAK ETAP

4	Aktivitas Pendanaan	Arus kas dapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan pelunasan pinjaman	Arus kas koperasi berasal dari pemasukan SHU dan pembayaran simpanan	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena telah memenuhi persyaratan.
E. Catatan Atas Laporan Keuangan						
1	Struktur	Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: ringkasan kebijakan, akuntansi signifikan yang diterapkan, informasi yang mendukung akun-akun dalam laporan keuangan, pengungkapan lain.	Catatan atas laporan keuangan yang telah disajikan berurutan dari gambaran umum, kebijakan akuntansi dan rencana pembagian SHU	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena koperasi menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP
2	Pengungkapan kebijakan akuntansi	Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus memberikan informasi: dasar pengukuran yang relevan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.	Penyajian catatan atas laporan keuangan koperasi, sebagai berikut: Standar pengukuran aset dan kebijakan pembagian SHU	√		Sesuai dengan SAK ETAP karena memberi informasi yang disyaratkan sudah sesuai dalam catatan atas laporan keuangan koperasi.

4. Pembahasan

a. Neraca

Neraca Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung menyajikan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Hal ini telah sesuai dengan aturan dalam SAK ETAP yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu periode tertentu yaitu bulan desember yang diakui sebagai akhir periode pelaporan.

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan, diharapkan dapat diperoleh entitas (SAK ETAP, 2013). Aset diakui dalam neraca karena manfaat ekonominya di masa yang akan datang mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Menurut SAK ETAP, aset minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, proverti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud.

Koperasi menyajikan pos-pos sebagai berikut: kas, bank, (kas dan setara kas), piutang lain-lain (piutang usaha dan lainnya), persediaan buku paket, persediaan barang (Persediaan), investasi properti, tanah, bangunan kantor, inventaris kantor, dan kendaraan bermotor (aset tetap), Aset

dalam proses (aset tidak berwujud). Pos-pos tersebut telah memenuhi kriteria minimal dari SAK ETAP, sehingga penyajian aset dalam neraca koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang masa kini koperasi yang timbul dari peristiwa masa lampau dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik koperasi dan mengandung manfaat ekonomi.

Menurut SAK ETAP, kewajiban minimal menyajikan pos-pos sebagai berikut: utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak.

Koperasi menyajikan kewajiban dengan akun-akun meliputi: tabungan sijako, hutang usaha, hutang lain-lain (utang usaha dan usaha lainnya), hutang pajak (aset dan kewajiban pajak). Akun-akun tersebut telah memenuhi kriteria minimal dari SAK ETAP, sehingga penyajian kewajiban dalam neraca koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

3) Ekuitas

Ekuitas yaitu hak residual atas aset koperasi setelah dikurangi kewajiban keseluruhan. Ekuitas/Modal yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Diantaranya terdiri dari: modal sendiri, lembaga dan selisih pendapatan dengan biaya

Menurut SAK ETAP, Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca apabila penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. Koperasi telah menyajikan pos judul dan sub jumlah lainnya dengan jelas dan relevan, sehingga penyajian ekuitas dalam neraca koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

4) Klasifikasi Aset dan Kewajiban

Menurut SAK ETAP, entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan.

Koperasi telah menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, terpisah dalam neraca serta klasifikasi lain untuk informasi yang lebih andal dan relevan. Koperasi menyajikan dalam aset dengan nama (Investasi) dibawah aset lancar dan diatas aset tetap. Pengelompokan tidak diklasifikasi sesuai likuiditas, sehingga klasifikasi aset dan kewajiban tidak sesuai dengan SAK ETAP.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban koperasi dalam suatu periode. Laporan laba rugi disajikan oleh koperasi dengan sebutan Perhitungan Hasil Usaha. Sedangkan penghasilan disajikan dengan sebutan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penghasilan terdiri dari pendapatan dan beban terdiri dari beban operasional dan non operasional.

Menurut SAK ETAP, Laporan laba rugi entitas mencakup minimal pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuntungan, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Laporan laba rugi koperasi belum mencakup semua pos-pos yang telah disyaratkan oleh SAK ETAP. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung hanya menyajikan akun-akun dalam laporan laba rugi meliputi pendapatan jasa pinjaman, pendapatan unit pusat, unit jasa dan usaha niaga (pendapatan). Biaya karyawan, biaya pemeliharaan bangunan dan kendaraan, biaya administrasi, biaya komputer, dan lain-lain (beban keuntungan), tetapi tidak terdapat beban pajak. Sehingga koperasi dalam menyajikan laporan laba atau rugi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.

Selain itu, SAK ETAP mempunyai syarat agar entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi Koperasi Pegawai Pemerintah

Kota Bandung telah menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi telah disajikan dengan relevan dan sesuai kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dengan terpenuhinya ketentuan SAK ETAP, maka penyajian laporan laba rugi koperasi telah sesuai SAK ETAP.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas koperasi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto (kekayaan) koperasi selama periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas disajikan oleh koperasi dengan judul laporan perubahan modal.

Menurut SAK ETAP, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode pelaporan serta pendapatan dan beban yang diakui dalam ekuitas. Laporan perubahan modal Koperasi meliputi SHU bulan berjalan (laba rugi periode pelaporan), dan SHU tahun lalu (beban yang diakui langsung dalam ekuitas). Dengan demikian, semua persyaratan dalam SAK ETAP telah terpenuhi, sehingga penyajian laporan perubahan ekuitas telah sesuai dengan SAK ETAP.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas koperasi selama periode tertentu

yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Menurut SAK ETAP, entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Koperasi telah mengelompokkan menjadi 3 arus kas yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

1) Aktivitas operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan koperasi koperasi dimana arus kas dari operasi usaha dan kegiatan simpan pinjam anggota disajikan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Menurut SAK ETAP, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas aktivitas operasi koperasi terutama diperoleh dari penghasilan atau SHU (pos SHU 31 Desember 2017), dan kegiatan simpan pinjam (pos kenaikan simpanan khusus). Pos-pos yang disajikan oleh koperasi telah memenuhi syarat SAK ETAP, sehingga penyajian aktivitas operasi dalam laporan arus kas sudah sesuai dengan SAK ETAP.

2) Aktivitas Investasi

Menurut SAK ETAP, arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa yang akan datang. Beberapa contoh pos arus kas dari aktivitas investasi koperasi yang mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumberdaya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan antara lain: kenaikan aset lain-lain, dan penurunan hutang jangka panjang lainnya. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, arus kas investasi dalam penyajiannya telah sesuai dengan SAK ETAP.

3) Aktivitas Pendanaan

SAK ETAP menjelaskan arus kas (aktivitas pendanaan) di dapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan pelunasan pinjaman. Beberapa contoh pos arus kas aktivitas pendanaan koperasi antara lain: cadangan (penerimaan kas), SHU tahun lalu (pembayaran kas), serta kenaikan simpanan (pelunasan pinjaman). Dengan terpenuhinya pos-pos yang menjadi syarat oleh SAK ETAP, maka penyajian aktivitas pendanaan di laporan arus kas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai SAK ETAP.

Secara menyeluruh, item-item yang telah dijelaskan tersebut diperbandingkan dalam laporan arus kas.

Laporan keuangan koperasi telah disajikan sesuai dengan ketentuan dalam item yang diperbandingkan tersebut, sehingga arus kas koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

1) Struktur

Menurut SAK ETAP, Catatan atas laporan keuangan secara normal urutan penyajiannya adalah sebagai berikut: ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, pengungkapan lain. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung menyajikan catatan atas laporan keuangan secara urut dari gambaran umum yang berisi pendirian koperasi, usaha koperasi, pengurus, pengawas anggota dan karyawan, kebijakan akuntansi serta rencana pembagian SHU. Maka dengan terpenuhinya urutan penyajian informasi catatan atas laporan keuangan koperasi sudah sesuai SAK ETAP.

2) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

SAK ETAP juga menyatakan catatan atas laporan keuangan dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus mengungkapkan signifikan diantaranya dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi lain yang lebih relevan untuk memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung menyajikan dasar pengukuran aset dan kebijakan pembagian hasil SHU. Dengan terpenuhinya syarat pengungkapan, pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

5. Kendala-kendala Penyajian SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Tidak terdapat kendala apapun dalam menyajikan laporan keuangan. Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan software excel untuk menyajikan laporan keuangan. Selain itu pengurus tidak terbebani dalam menyajikan laporan keuangan.

Penulis dapat melihat bahwa laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah melakukan penyajian dengan baik. Pos-pos klasifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Walaupun beberapa ketidaksesuaian itu diakibatkan koperasi memang tidak mencantumkan beban pajak, karena koperasi tidak pernah penunggakan pajak atau mengalami pajak yang kurang dan lebih bayar, sehingga menurut penulis Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sudah menjalankan dengan baik dan relevan berdasarkan SAK ETAP.